

**KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK AKIBAT  
ADANYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**CICILIA HELENA CARBONILLA**

**NIM: 2019110890**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK AKIBAT  
ADANYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16  
TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH**

**CICILIA HELLENA CARBONILLA**

NIM: 2019110890

**DISETUJUI:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum**  
NIDN : 081 407 7102



**Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum**  
NIDN : 080 102 8601

**MENGETAHUI:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**DAN SOSIAL HUMANIORA**

**ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**UNIVERSITAS FLORES**



**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN : 082 303 6701



**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum**  
NIDN : 081 211 7801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK AKIBAT  
ADANYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16  
TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji**

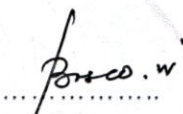




**Pada Hari : Selasa**

**Tanggal : 20 Februari 2024**

**Oleh:**

**CICILIA HELLENA CARBONILLA**  
**NIM: 2019110890**

**Tim Penguji:**

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H         | (Ketua)      |  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekertaris) |  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum             | (Anggota)    |  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum          | (Anggota)    |  |
| 5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum          | (Anggota)    |  |

**MENGESAHKAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0823036701**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**

  
**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
**NIDN: 0812117801**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cicilia Hellena Carbonilla  
Nim : 2019 110 890  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ende, Februari 2024



Cicilia Hellena Carbonilla

2019 110 890

## **MOTTO**

”Orang tua adalah anutan utama bagi anak-anak. Setiap kata, setiap gerakan, dan tindakan memengaruhi. Tidak ada orang lain atau kekuatan luar yang memiliki pengaruh lebih besar pada seorang anak selain orang tua.” –

Bob Keeshan

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang tuaku, Bapak Yoseph M.J. Carbonilla dan Ibu Christina Bagenda
3. Kakakku, Alberto Hendriko Carbonilla
4. Sahabat dan teman-teman seangkatan 2019
5. Lembaga Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Prodi Ilmu Hukum yang menjadi tempat saya menimba ilmu pengetahuan
6. Almamaterku tercinta Universitas Flores

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan kasih-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Akibat Adanya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan juga kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan tentunya, namun penulis sudah berusaha semampunya guna untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.M.M.A selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores beserta jajarannya
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

4. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi dukungan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dan juga sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberi dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
7. Ibu dan Bapak Staf Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam kelancaran akademis di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Universitas Flores yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung

Penulis menyadari begitu banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini agar dapat berguna dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Februari 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Skripsi berjudul Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Akibat Adanya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disusun Oleh Cicilia Hellena Carbonilla, Nim: 2019 110 890.**

---

Alimentasi adalah pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah. Alimentasi diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana kewajiban pemberian Alimentasi kepada anak akibat adanya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; (2). Apa upaya Hukum yang dapat dilakukan, apabila setelah terjadi perceraian orang tua tidak melaksanakan alimentasi terhadap anaknya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode penelitian normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan alimentasi. Hak alimentasi dilindungi oleh hukum dan undang-undang, hal mana dapat diketahui melalui rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Upaya hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian Pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan non-litigasi. Namun, untuk penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi berupa lembaga yaitu badan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia belum difasilitasi untuk menangani permasalahan keluarga. Untuk kewajiban alimentasi setelah orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam jalur Litigasi atau di Pengadilan dapat ditempuh dengan upaya mengajukan gugatan hak nafkah dan upaya hukum eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat.

Kata kunci: pemberian alimentasi, akibat perceraian

## ABSTRACT

**The thesis entitled The Obligation to Provide Alimony to Children Due to Divorce According to Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, prepared by Cicilia Hellena Carbonilla, Nim: 2019 110 890.**

---

Alimony is the provision of maintenance based on family relationships. Parents are obliged to (give) alimony to children and vice versa, children to parents who do not have support. Alimony is regulated in article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

The problem formulation in this research is: (1). What is the obligation to provide alimony to children due to divorce according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage; (2). What legal remedies can be taken if, after a divorce, parents do not carry out alimony for their child?

The method used in this research is: normative law research using normative case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing laws. The subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society.

Based on the research results, it can be concluded that divorce will bring various legal consequences, one of which is related to alimony. The right to alimony is protected by law and statute, which can be ascertained through the formulation of article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and legal remedies against parents who do not carry out alimony obligations can theoretically be carried out through court settlement or litigation. or outside of court, non-litigation. However, for out-of-court or non-litigation settlements in the form of institutions, namely alternative dispute resolution bodies in Indonesia, have not been facilitated to handle family problems. For alimony obligations after parents do not carry out alimony obligations in Litigation or in The court can take action by filing a claim for the right to livelihood and legal action to execute the judge's decision which has binding legal force.

**Key words: granting alimony, consequences of divorce**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian Kewajiban .....	12
2.2. Pengertian Perkawinan.....	12

2.3. Pengertian Perceraian.....	15
2.4. Pengertian Alimentasi .....	16
2.5. Pengertian Anak .....	17
2.6. Pengertian Nafkah .....	21
 <b>BAB III KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN</b>	
3.1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	23
3.2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan .....	29
3.3. Hak dan Kedudukan Anak Di Mata Hukum .....	32
 <b>BAB IV UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA SETELAH TERJADI PERCERAIAN ORANG TUA TIDAK MELAKSANAKAN ALIMENTASI TERHADAP ANAKNYA</b>	
4.1. Upaya Hukum Secara Litigasi (secara Perdata dan secara Pidana) .....	34
4.2. Upaya Hukum Secara Non Litigasi .....	39
4.3. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif .....	40
4.4. Perbedaan Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian .....	42

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran-Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN